

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Busroh, Abubakar dan Abu Busroh, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia*, Grafit, Jakarta, 1994

El-Muhtaj, Majda, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007

Gerakan Pramuka Kwartir Nasional, *75 tahun kependuan dan kepramukaan*, Jakarta, 1987

Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu HTN Jilid II*, Konpres, Jakarta, 2006

-----, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

M Iman Santoso, *Perpektif Imigrasi dalam Pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Moh Mahfud MD, *Dasar & struktur ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Inu Kencana, Jakarta, 2010

R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tatanegara*, Rineka Cipta

Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung, Armico

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124

Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66

Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

LAMPIRAN



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**BAB II**  
**KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**



**BAB III**  
**HAK WARGA NEGARA ASING DALAM GERAKAN**  
**PRAMUKA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

## ABSTRAK

Warga Negara Asing merupakan penduduk Indonesia apabila tinggal di Indonesia sesuai dengan ijin tinggalnya. Di dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia. Mahasiswa asing yang tinggal di Indonesia memperoleh izin tinggal terbatas. Kartu Tanda Izin Tinggal Sementara atau yang biasa disebut KITAS didapatkan dengan syarat menyerahkan fotokopi paspor, ada sponsor, memiliki izin dari DIKTI. Prosedur masuknya mahasiswa asing di Universitas Airlangga ada 3 jalur, yaitu program beasiswa darmasiswa, beasiswa KNB (Kerjasama Negara Berkembang), dan jalur mandiri.

Mahasiswa asing mempunyai hak sipil yang sudah dituangkan dalam UUD 1945 yakni hak mengeluarkan pendapat dan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Selain itu, hak ini diatur dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia sedunia yang pada dasarnya juga menjamin mahasiswa asing untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Di dalam Gerakan Pramuka di Universitas Airlangga (UKM Pramuka) mahasiswa asing dapat mengapresiasi hak sipil. UKM Pramuka Unair memiliki adat istiadat dan aturan khusus yang mengatur tentang anggota pramuka luar biasa yang disebut sebagai adat Gugusdepan.

Kata Kunci : Mahasiswa Asing, Hak Sipil